Vol. 5. No. 2 (2022) 145-159	E-ISSN: 2723-4681	P-ISSN: 2722-2764
Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith		

Fiqh Assets Comparison: Implications in the Islamic Economy

Endah Robiatul Adawiyah, Inayatul Ummah, Udin wahrudin

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Amar Subang, Indonesia

Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Abdul Kabier Banten, Indonesia

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Amar Subang, Indonesia

Email: endahrobiatuladawiah@gmail.com, wahrudina.arch@gmail.com

Submitted:	Revised:	Published:
23-05-2022	12-11-2022	31-12-2022
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.443		

Abstract

The Paper is to study the Fiqh Assets Comparison; Implications in the Islamic Economy. This research uses qualitative methods with a library study approach. In analyzing the position of property in Islamic economics that has a diversity of jurisprudence viewpoints. The discussion of Assets is considered important because all humans like property and there is a tendency to own property, the existence of Assets can harm or benefit humans depending on how they view the position of the treasure itself. Assets is a concrete interprets in real physical form and has value, favored by humans, can be stored, owned, and utilized by legality according to shari'ah or obtained in a way that is by the Shari'ah. Differences in the conception of Assets between jurists can give birth to differences in position, especially in the concept of rights and benefits. Jumhur considers rights and benefits as part of the Assets while Hanafiah scholars view rights and benefits, not in the category of Assets. The implications on the legal position of the transaction, including the ijarah transaction for Hanafiah ijarah scholars will end if the owner of the rental goods dies, while jumhur ulama considers that the benefits of the ijarah Assets can be inherited and the ijarah is not completed unless the heir agreement. The main contribution of this study concern on fill the gap how the concept of sharia economics in the professional perspection of jurispruding

Keywords: Assets, Comparative Jurisprudent, Mu'amalah Contracts

Abstrak

Riset ini bertujuan untuk mempelajari Perbandingan Aset Fiqih; Implikasi dalam Ekonomi Islam. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Dalam menganalisis kedudukan harta dalam ekonomi Islam yang memiliki keragaman sudut pandang fiqih. Pembahasan Harta dianggap penting karena semua manusia menyukai harta dan ada kecenderungan untuk memiliki harta, keberadaan Harta dapat merugikan atau menguntungkan manusia tergantung bagaimana mereka memandang kedudukan harta itu sendiri. Aset merupakan wujud konkrit yang berwujud fisik nyata dan bernilai, disukai manusia, dapat disimpan, dimiliki, dan dimanfaatkan secara legalitas menurut syari'ah atau diperoleh dengan cara yang syari'ah. Perbedaan Konsepsi Harta di antara para ahli hukum dapat melahirkan perbedaan kedudukan, khususnya dalam konsep hak dan manfaat. Jumhur menganggap hak dan manfaat sebagai bagian dari Harta sedangkan ulama Hanafiah

memandang hak dan manfaat, bukan dalam kategori Harta. Implikasinya terhadap kedudukan hukum jual beli, termasuk jual beli ijarah bagi ulama ijarah Hanafiah akan berakhir jika pemilik barang sewa meninggal dunia, sedangkan jumhur ulama menganggap manfaat Harta ijarah dapat diwariskan dan ijarah tidak selesai kecuali perjanjian ahli waris. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah untuk mengisi kesenjangan bagaimana konsep ekonomi syariah dalam perspektif profesional fiqih.

Kata kunci: Harta, Fiqh Perbandingan, Akad Mu'amalah

A. PENDAHULUAN

Diskusi tentang manusia salah satunya akan selalu berhubungan dengan pemenuhan kebutuhannya. Secara intrinsik harta adalah bagian dari kebutuhan manusia. Dalam proses pemenuhan kebutuhan secara syari'at Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah baik dalam persoalan kedudukan harta bagi manusia yang satu dengan manusia lain atau antara yang hak dan bukan hak, maupun persoalan bagaimana cara memperolehnya juga harus sesuai dengan tuntunan syari'ah dengan memperhatikan aspek moralitas sosial.

Al-qur'an secara eksplisit mengatur konsep harta dengan batasan-batasan global, yaitu sebagai milik Allah yang diamahkan pada manusia untuk diolah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dunia dan akhirat, sesuai dengan bunyi surat Al-Hadid ayat 7 yang artinya; *"Berimanlah kamu kepada Allah dan rosul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang telah engkau kuasai, maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) hartanya mendapatkan pahala yang besar."*

Harta sebagai bagian inti dalam ekonomi sehingga mekanisme cara produksi, distribusi, dan konsumsi harus sesuai dengan syari'ah, seperti yang di ulas dalam surat an-nisa ayat 29 yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Selain itu juga diatur dalam hukum kebendaan dan perikatan, hukum kebendaan yang mengatur hak mutlak kebendaan yang wajib diakui dan dihormati sedangkan hukum perikatan yang mengatur hak dan kewajiban atas harta diantara kedua belah pihak".*¹

Dewasa ini terkadang umat Muslim lupa konsep dasar harta, kedudukan dan cara memperolehnya tidak sesuai dengan syaria'at Islam, dengan menjadikan harta sebagai tujuan hidup yang harus diperoleh dengan berbagai cara. Dalam hal ini penulis fokus melihat perbedaan sudut pandang ulama fiqih dalam melihat konsep harta yang melahirkan konsep yang berbeda dalam menentukan tingkatan hak dan *bathil*. Penulis menganggap penting untuk dilakukan penelitian yang mengkaji permasalahan ini dengan pendekatan kajian pustaka, mengenai kedudukan harta dan klasifikasi harta dalam sudut pandang perbedaan fiqih yang melahirkan konsekuensi hukum yang berbeda dalam harta tersebut.

Banyak ditemukan berbagai penelitian yang membahas konsep harta, namun dengan berbagai keterbatasan penulis, ditemukan sedikit yang membahas konsep harta dari sudut pandang fiqih perbandingan dan implikasinya dalam ekonomi Islam, secara praktis. Diantaranya ialah penelitian Rusdan dengan mengangkat konsep harta dalam islam dan fokus

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 243–44.

analisisnya terhadap klasifikasi harta yang melahirkan perbedaan hukum terhadap kedudukan harta tersebut, hasilnya menunjukan bahwa harta memiliki kedudukan yang penting dalam pemenuhan kebutuhan *dzaruriyah* manusia dan kedudukan hukum harta dapat dilihat dari kemanfaatannya.² Penelitian Mutmainnah tentang konsep harta dalam Islam, menunjukan bahwa kepemilikan sejati dari harta adalah Allah, sehingga cara-cara memperolehnya harus dengan cara yang diridhai oleh Allah.³ Penelitian Iswandi melihat sisi pemeliharaan harta sebagai sebuah kemaslahatan bagi hidup manusia.⁴

Konsep Ekonomi Islam dan implikasinya dilihat dari sudut pandang para fuqoha menjadi urgensi dari penelitian ini. Penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat jauh dengan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dari kajian yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap konsep harta serta implikasinya dalam ekonomi Islam Dengan konsep yang dibangun bahwa perbedaan kedudukan hukum sebuah transaksi ekonomi islam dapat dilihat dari perbedaan sudut pandang para fuqoha dalam menentukan kedudukan harta. Hal ini dapat berimplikasi pada perkembangan dan kemajuan transaksi ekonomi umat yang sesuai dengan syari'at Islam.

B. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Boghan dan Taylor⁵ menyatakan bahwa penelitian kualitatif ialah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan pengamatan terhadap konsep melalui dokumentasi dan observasi dari data primer dan sekunder yang deskripsikan, disajikan, direduksi, dianalisis, dan disimpulkan bahwa penelitian ini termasuk dalam katagori *library reserch*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang terdiri dari kitab-kitab, buku-buku, sedangkan data sekunder berupa dokumen sejarah, media masa, jurnal-jurnal, dan sumber lainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang dijelaskan dengan argumentatif dan disajikan dalam bentuk analisis. Menurut Moleong dalam Suharsimi,⁶ sumber data penelitian kualitatif berupa tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detail, agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Harta menurut Ulama Fiqih

² Rusdan Rusdan, "Konsep Harta (Al-Maal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *El-Hikam* 10, no. 2 (2017): 365–403.

³ Muthmainnah Muthmainnah, "Konsep Harta Dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 10, no. 1 (2016): 135–55.

⁴ Andi Iswandi, "Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 1 (2014).

⁵ D. M. A. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 38th ed. (Bandung: PT. Rosda Karya, 2018), hlm. 4.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktis*, cet-15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 22.

Harta dalam bahasa Arab sering disebut dengan *al-maal mashdar* dari kata *al-maala-yamiilu-mailan* yang bermakna condong, kecenderungan, sesuatu yang menjadi kesenangan manusia. Setiap manusia memiliki kecenderungan ingin menguasai dan memiliki harta,⁷ dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), *pertama* harta diartikan dengan barang seperti uang dan lain sebagainya yang menjadi kekayaan orang lain. *Kedua*, harta diartikan dengan kekayaan berbentuk maupun tidak berbentuk tetapi memiliki nilai menurut hukum untuk dimiliki,⁸ sedangkan menurut istilah syar'i, harta dimaknai juga dengan uang atau semisalnya dalam bentuk tabungan.⁹ Dengan demikian, harta dijadikan kekayaan yang memiliki nilai dengan bentuk yang berbeda bergerak dan benda tidak bergerak seperti binatang ternak, tanah, bangunan, emas, perak, dan lain-lain.

Sedangkan harta menurut ulama fiqih yang dikutip oleh Abdurahman,¹⁰ bahwa: Ulama Hanafiah menganggap harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai serta dapat diukur dalam ganti rugi ketika sirusak atau hilang secara intrinsik maupun secara nilai. Harta dapat dihadirkan ketika dibutuhkan, disimpan, dan dimanfaatkan serta dilindungi oleh manusia;¹¹ Ulama mazhab Maliki, menganggap harta sebagai sesuatu yang dapat dikuasai atau diperoleh secara adat, dan membatasi orang untuk memilikinya; Ulama mazhab Syafi'i menganggap harta sebagai sesuatu yang dapat bermanfaat dan memiliki nilai bagi pemilikinya; dan Ulama Mazhab Hambali, menganggap harta sebagai sesuatu yang bernilai dan dilindungi oleh undang-undang.

Pengertian harta menurut ke empat ulama fiqih tersebut dapat diartikan segala sesuatu yang memiliki nilai intrinsik dan ekstrinsik, secara materi intrinsik memiliki nilai alaupun dalam keadaan rusak dan dapat dimanfaatkan, dan secara ekstrinsik dapat disimpan, dimanfaatkan serta diukur secara kuantitas dan kualitas yang dapat dilindungi oleh undang-undang. Manfaat dimaknai dengan faidah atau kegunaan dari suatu benda, inilah yang menunjukkan nilai dari suatu harta, sedangkan kepemilikan suatu benda yang berhubungan dengan hak, bukan termasuk dari makna harta, seperti hak pengasuhan, hak milik, hak guna pakai, dll.

Menurut Abdul Aziz,¹² ulama mazhab Hanafiah menganggap bahwa harta dimaknai oleh pendahulunya kurang komprehensif dan kurang akomodatif, sesuai dengan Surat al- Baqarah: 29, bahwa

هُوَ الَّذِي جَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ ضِجْمًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ ۖ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu."¹³

⁷ (Dimyauddin Djuawaini 2008, 34)

⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 485.

⁹ Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin., *Fatwa-Fatwa Zakat* (Jakarta: Darussunnah, 2008), hlm. 530.

¹⁰ Dkk Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 18–19.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* ((Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 524.

¹² Dahlan, hlm. 525.

¹³ Mujamma'almaalik fadh li thiba al-mushaf asy-syarif medinah Munawwaroh, "Al-Qur'an Dan Terjemah," *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan penyelenggara penterjemah Al-qur'an, 1990). hlm. 13

Ayat di atas menunjukan bahwa Allah menciptakan alam semesta untuk umat manusia, dan manusia lebih senang dengan kesenangan dunia, dan terkadang lupa bahwa itu semua itu di bawah pengawasan Allah. Menurut D. Djuwaini,¹⁴ harta harus memuat dua komponen, yakni komponen *'aniyyah* yakni memiliki wujud secara riil, dan komponen *'urf* yakni pandangan adat yang menganggap segala sesuatu sebagai harta. Komponen *'urf* ini sebagai pandangan adat masyarakat secara lokal maupun secara menyeluruh terhadap harta tersebut, dengan tujuan untuk mengambil kegunaan atau faidah yang nampak maupun yang tidak nampak.

Sedangkan konsep harta menurut Tengku Muhamad Hasby¹⁵ bahwa harta diartikan dengan semua komponen yang memiliki karakter: segala sesuatu yang memiliki nama atau identitas, memiliki tempat dan dapat diolah atau dirawat; segala sesuatu yang bisa diperoleh dan dihak milik oleh manusia; memiliki nilai yang dapat diperjualbelikan, dapat diambil manfaatnya serta dapat disimpan; segala sesuatu yang memiliki bentuk riil; dan sesuatu yang berwujud, sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta.

Harta merupakan salah satu unsur terpenting bagi manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia, hal ini menjadikan harta sebagai bagian dari dasar dalam pemenuhan lima pokok *ad-daruriyah* dalam sudut pandang ushul fiqih, berdasarkan banyaknya ayat dan hadis yang menjelaskan konsep harta, dan menjadi fitrah manusia dengan kecondongannya untuk menguasai dan mempertahankan hartanya.¹⁶

Secara eksplisit kedudukan harta harus bersumber dari akal dan wahyu, yang menekankan pada aspek tauhid dan keseimbangan. Menurut Ahmad Hasan Ridwan, aspek tauhid mengantarkan manusia pada keyakinan satu kesatuan dunia dan akhirat, sedangkan keseimbangan akan mengantarkan manusia pada pengimplementasian hidup seimbang, selaras, dan serasi.¹⁷ Dengan demikian bahwa harta dapat diartikan dengan segala sesuatu yang memiliki nilai konkrit, dapat berwujud, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ketentuan syari'at.

2. Konsep Harta dalam Al-qur'an

- a. Secara hakikat harta merupakan milik yang diciptakan-Nya yakni Allah sebagai Pemilik mutlak, sedangkan manusia hanya pengemban amanah untuk mengolah dan menjaganya dengan batasan-batasan antara yang hak dan bathil serta kepedulian sosial dengan adanya kewajiban zakat, seperti penjelasan surat al-Hadid ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

*“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rosul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari harta kamu yang telah Allah pinjamkan kepadamu”*¹⁸

¹⁴ Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 39–40.

¹⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy., *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 138.

¹⁶ Ghufron A. Mas'adi 2002, hlm. 12)

¹⁷ Irfan Hasan Ridwan, Ahmad. Safrudin, *Dasar-Dasar Epistemologi Islam*, ke-1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 407.

¹⁸ Munawwaroh, “Al-Qur'an Dan Terjemah.”, hlm. 901

Unsur-unsur yang ditentukan dalam Islam tentang harta adalah unsur zakat, infak, dan sedekah.¹⁹ Pengembalian hak Allah dalam harta dapat diwujudkan dalam kepedulian sosial terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan agar tercipta keseimbangan kesejahteraan hidup.

- b. Harta menjadi sarana dan bekal menuju kehidupan akhirat, sebagaimana tersurat dalam surat al-Baqarah ayat 262:²⁰

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا وَلَا إِذَا هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan sang penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

Pencapaian pemenuhan kebutuhan hidup di dunia secara lahiriah sebagai sarana atau jalan mencapai tujuan akhirat. Tentunya hal ini sesuai dengan tujuan dari bermu’amlah yakni mencapai *falah*, menurut Hendriyanto, *falah* sebagai kelangsungan hidup, kebebasan keinginan, kekuatan, dan kehormatan²¹

- c. Kecendrungan manusia dalam kesenangan duniawi seperti dalam surat al-Imran ayat 14, yang artinya:²² *Diadakan Indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan sisi Allah lah tempat kembali yang baik.*
- d. Harta menjadi ujian yang dijelaskan dalam surat al-Ankabut ayat 15

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَ هَذَا جَزَاءٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian hanyalah cobaan bagi kalian, disisi Allah lah pahala yang besar”.

- e. Harta menjadi perhiasan dunia yang menyenangkan, untuk itu manusia harus dapat menjaga dan memanfaatkan harta sebaik-baiknya sebagai sarana ibadah, seperti yang dijelaskan dalam surat al-Kahfi: 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.*²³

¹⁹ Paulina Lubis et al., “Measuring The Level of Knowledge and Awareness of The People in Jambi Province Pay Zakat Through E-Commerce,” *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 6, no. 2 (2021): 292.

²⁰ Munawwaroh, “Al-Qur’an Dan Terjemah.” 66

²¹ Hendriyanto Hendriyanto and Juhaya S Praja, “Sharia Philosophy Correlation and the Islamic Economic Philosophy,” *Economit Journal: Scientific Journal of Accountancy, Management and Finance* 1, no. 1 (2021): 12.

²² Munawwaroh, “Al-Qur’an Dan Terjemah.” hm. 77

²³ Munawwaroh, Al-qur’an dan terjemah, hlm. 450.

- f. Harta dapat menyebabkan musibah, sebagaimana hadits nabi Muhammad SAW, *“Celakalah orang yang menjadi hamba dinar, orang yang menjadi hamba dirham, orang yang menjadi hamba toga atau pakaian, jika diberi, ia bangga, bila tidak diberi ia marah, mudah-mudahan ia celaka dan merasa sakit, jika ia kena suatu musibah, dia tidak akan memperoleh jalan keluar”* (H.R. Bukhari). Hadist diatas menjelaskan bahwa harta bukanlah tujuan hidup, melainkan sebagai sarana memnjalani kehidupan, untuk itu kecenderungan yang berlebihan sehingga menghambakan diri terhadap harta merupakan perbuatan yang merugikan.²⁴

3. Cara Memperoleh Harta menurut Islam

Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk muamalah. Dalam Islam, umat manusia dianjurkan memiliki harta, dengan batasan cara yang sesuai dengan syari’at islam. Adanya batasan dalam memperoleh harta sebagai *control* terhadap kecendrungan manusia yang memiliki potensi kecenderungan mencintai harta bahkan potensi serakah. Berikut beberapa alasan mengapa Islam mengatur cara memperoleh harta:

Pertama, harta menjadi kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan hidup akhirat, karena itu Islam memerintahkan manusia untuk mencari dan memilikinya, dan mengajarkan bagaimana cara memperolehnya agar sesuai dengan syari’at yang diajarkan yakni dengan baik dan benar. Perintah manusia untuk mencari harta di siratkan dalam surat Al-jumu’ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

*apabila telah diturunkan sembahyang maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah”.*²⁵

Berlimpah nikmat dan karunia yang Allah berikan dimuka bumi, umat manusia di perintahkan berusaha dan ingatkan untuk selalu berdoa dengan sungguh-sungguh dalam mencari karunia Allah dalam bentuk harta, seperti yang dijelaskan dalam Surat An-nisa ayat 32.²⁶

وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

“Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu” (Q.S. An-Nisa:32).

Apabila seseorang tersebut telah berusaha dan telah meminta pula perkenan dari Allah, maka Allah akan memberikan karunianya kepada siapaun yang ia kehendaki. Sebagaimana firma-Nya:²⁷

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

²⁴ Rachmat Syafe’i, *Fiiqh Muamalah*, 8th ed. (baandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 25.

²⁵ Munawwaroh, “Al-Qur’an Dan Terjemah,” hlm. 933.

²⁶ Munawwaroh, “Al-Qur’an Dan Terjemah.” “Al-Qur’an Dan Terjemah” hlm. 122

²⁷ Munawwaroh. “Al-Qur’an Dan Terjemah” hlm. 932

“Demikianlah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah mempunyai karunia yang besar” (Q.S.Al-Jumu’ah: 4).

Kedua, Islam memandang harta bukanlah tujuan melainkan alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Islam tidak membatasi manusia untuk berusaha dan memiliki harta, akan tetapi dengan proses yang baik dan halal serta dalam proses penggunaan hartapun harus memperhatikan tingkat kebutuhan hidup bukan keinginan serta memperhatikan kehidupan sosial lainnya.

Harta atau *mal* menjadi salah satu tujuan *maqashid al-syar’iyah*, yakni *hifdzu al-mal*, inti dari tujuan syari’at ialah mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan bagi manusia.²⁸ Dengan adanya batasan yang hak dengan yang *bathil* menjadi acuan umat manusia mewujudkan *hifdzu al-mal*. Berbagai cara dilakukan manusia untuk mendapatkan harta sebagai karunia Allah, secara umum cara memperoleh dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 1). pencarian harta yang masih bebas belum ada pemiliknya yang disebut dengan *lhrazul mubahat*, seperti menangkap ikan dilaut. Dan 2). memperoleh harta dengan berbagai transaksi akad, yang dikenal dengan akad atau al- uqud baik tabaru maupun *tijarri*.

4. Fungsi Harta

Keberadaan harta menjadi beragam fungsi dari fungsi yang baik sampai pada fungsi yang tidak baik. Menurut Syafe’i²⁹ fungsi harta dapat diklasifikasikan, yaitu: *pertama*, untuk menyempurnakan ibadah *mahdah* dan *ghair mahdah*, diantaranya ibadah yang terdapat dalam rukun Islam, contohnya Pelaksanaan haji membutuhkan bekal yang lumayan untuk dapat pergi haji, sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. *Kedua*, menyeimbangkan kehidupan antara duniawi dan akhirat, karena Islam merupakan ajaran agama yang mengajarkan keseimbangan. “(Bukanlah orang yang baik, yang meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan meninggalkan masalah akhirat untuk urusan duniawi, sehingga seimbang diantara keduanya. Karena masalah dunia adalah menyampaikan manusia kepada masalah akhirat”, contoh: memiliki tempat tinggal, tidak terlunta-lunta dijalan.

Ketiga, untuk menjaga generasi dari kelemahan, iman, kelemahan harta, kelemahan ilmu, dan kelemahan yang lainnya seperti yang tertuang dalam surat an-Nisa ayat 9. Kefakiran bisa mendatangkan kekufuran ke kafiran atau murtad, contoh: memiliki bekal tabungan dalam bentuk apapun. *Keempat*, untuk menumbuhkan keilmuan, karena proses menuntut ilmu membutuhkan perjuangan, contoh biaya pendidikan, biaya diklat, biaya kehidupan ketika menempuh pendidikan.

Kelima, untuk menjalankan roda perputaran dan keharmonisan antara yang kaya dengan yang miskin. Islam mengajarkan keseimbangan dan perputaran harta, agar harta tidak didominasi oleh golongan tertentu dikenal dengan zakat apabila mencapai pada nisabnya,³⁰

²⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Ke-3 (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 1.

²⁹ Syafe’i, *Fiiqh Muamalah*, Ke 3. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006). hlm. 31–32.

³⁰ Ashima Faidati, “Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus Di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung),” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2018): 181.

contoh, penghimpunan, pengolahan dan penyaluran dana Zakat. Dan *Keenam*, mempererat tali silaturahmi, dengan berbagai transaksi mengakibatkan adanya saling komunikasi, contoh, transaksi jual beli, adanya komunikasi antara penjual dan pembeli.

5. Implikasi Harta dalam Ekonomi Menurut Ulama Fiqih

Pengertian harta dari keempat imam mazhab menunjukkan terdapat perbedaan konsepsi tentang harta yang melahirkan perbedaan hukum, dari keempat fuqaha tersebut digolongkan menjadi dua, menurut Wahbah Juhaili dalam bukunya Rahmat Syafi'i golongan tersebut yakni Jumhur ulama fiqih selain Hanafiah dan ulama Hanafiah.³¹ Menurut ulama Hanafiah harta merupakan sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan, di luar ketiga konsep tersebut bukan kategori harta, yang menjadi fokusnya adalah penguasaannya dengan tujuan pemanfaatan, sedangkan Jumhur ulama memandang konsepsi harta sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, sesuatu dianggap harta apabila memiliki nilai atau manfaat, baik itu dikuasai secara fisik maupun tidak dikuasai secara fisik tetapi memiliki nilai atau manfaat.

Perbedaan konsep ini melahirkan perbedaan ketetapan hukum terhadap beberapa konteks diantaranya hukum pergantian barang *ghasab*, hukum akad *ijarah* atau sewa, dan hukum waris. *Ghasab*, diartikan sebagai perbuatan menguasai harta orang lain, dengan terang-terangan dan paksa tanpa haknya, tetapi juga bukan diartikan mencuri atau merampok harta orang lain, *ghasab* ini dapat terjadi secara fisik maupun secara non fisik dalam bentuk penguasaan manfaat. Perbuatan *ghasab* jelas dilarang dalam Islam sesuai dengan ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 yang artinya "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta ini kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui", dan surat an-Nisa ayat 29, selain itu banyak hadits Nabi yang menegaskan larangan mengambil harta secara tidak baik, diantaranya hadits Shahih Bukhari no. 3026 dan Shahih Muslim no. 1610, serta Sunan Adurquthni no. 2885.

Perbedaan ulama fiqih dalam kedudukan harta, dari segi manfaat yang melahirkan perbedaan hukum pengembalian, Jumhur ulama sepakat bahwa orang yang meng-*ghasab* harta orang lain dan memanfaatkannya, maka wajib mengembalikan harta secara fisik dan pengembalian atas manfaat yang digunakannya, sedangkan menurut ulama Hanafiah pengembalian harta *ghasab* hanya dalam bentuk fisiknya saja tidak dalam bentuk pengembalian manfaat.³²

Ijarah atau sewa, pada akad sewa atau *ijarah* akan berakhir dengan berakhirnya masa akad, yang menjadi perbedaan dalam hal berakhir dan keberlanjutan dalam bentuk waris, menurut ulama Hanafiah *ijarah* akan berakhir apabila *muakid* meninggal dunia dan tidak diwariskan, sedangkan Jumhur ulama menganggap bahwa meninggalnya salah satu *muakid* tidak mengakibatkan berakhirnya akad *ijarah* akan tetapi akan berlanjut menjadi hak waris³³

³¹ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, Ke 3. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 22.

³² Syafi'i, Rahmat, *Fiqih Muamalah* " Ke 3. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 23.

³³ Syafi'i, Rahmat, " *Fiqih Muamalah*". Ke 3. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 24.

Warisan, perbedaan pendapat hak yang dapat diwariskan adalah tentang hak *khiyar* syarat, dan *ru'yah*, menurut ulama Hanafiah hal tersebut tidak dapat diwariskan sedangkan menurut jumhur ulama hal tersebut dapat diwariskan.

Perbedaan konsep melahirkan perbedaan implikasi dalam beberapa penerapan yang berbeda, *pertama*, pada penerapan harta *ghasab* yang harus dikembalikan, lebih relevan pendapat Hanafiah hanya dengan mengembalikan bentuk fisiknya saja tanpa harus mengembalikan penggunaan manfaatnya, dan sudah menjadi kebiasaan atau adat masyarakat dalam proses pengembalian hanya pada bentuk fisiknya saja. *Kedua*, implikasi yang relevan pada penerapan harta *ijarah* atau sewa adalah pendapat mayoritas ulama fiqih, yang berbeda dengan pendapat ulama Hanafiah, karna dalam pengakuan hak waris terhadap harta *ijarah* apabila *muakid* meninggal dunia, yang dianalogikan dengan kewajiban penanggung utang *almarhum* yang menjadi tanggungan ahli waris.

Ketiga, implikasi yang relevan dalam penerapan harta waris, bukan pendapat ulama Hanafiah akan tetapi pendapat mayoritas ulama fiqih, sebagaimana beralihnya hak dan kewajiban dari mawaris kepada ahli waris, begitu juga dengan segala sesuatu yang dapat menguatkan dan membatalkan hak dan kewajiban tersebut.

Konsep harta menjadi perdebatan para ulama dalam menentukan hukum, ciri, dan bagian-bagiannya, berikut pembagiannya:

a. *Mutaqawwim* dan *Ghair Mutaqawwim*³⁴

Mutaqawwim diartikan dengan sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara. Harta *mutaqawwim* dianggap baik dari segi jenis dan juga dari segi cara memperolehnya, sesuai dengan tuntunan syari'at Islam yakni salah satunya termasuk katagori harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan *thayyib* atau baik.

Sedangkan harta *ghair mutaqawwim* merupakan sesuatu yang belum dimiliki oleh manusia, namun masih berada bebas dialam liar. Ataupun sesuatu yang dilarang untuk dikonsumsi berdasarkan ketentuan syara, seperti meminum terlarang. Larangan konsumsi atau penggunaan harta tersebut dilarang dengan pengecualian yakni *dharurat* dengan tujuan salah satunya menjaga *maqashid al-syar'iyah*. Perbedaan ini melahirkan keadaan hukum yang berbeda. Menurut ulama fiqih harta *mutaqawwim* boleh dan sah diperjual belikan bahkan diproduksi dan didistribusikan yang lain sedangkan ulama Hanafiyah berpenapat bahwa, ini berbeda hukumnya bagi harta *ghair mutaqawwim* yang tidak sah diperjual belikan.

Selain itu apabila harta ini dirusak maka yang merusak berkewajiban mengembalikan seperti semula dengan mengganti nilai yang sepadan. Berbeda halnya dengan harta yang *mutaqawwim*, yakni tidak berkewajiban mengganti. Sedangkan ulama Hanafiyah menganggap berbeda yakni tetap memiliki kewajiban mengganti pada harta *ghair mutaqawwim* sesuai dengan peraturan Negara Islam.³⁵

b. *'Iqrar* dan *Manqul*

³⁴ Az-Zuhaili Wahbah, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu," Trj. DarulFikr, 2011, hlm. 44.

³⁵ Syafi'i, Rahmat" *Fiqih Mu'almaalah*, 2006, hlm. 33.

Menurut Hanafiyah, *manqul* diartikan karakter harta diantaranya dapat dipindah tempatkan secara fisik dan nilainya. Dan *'iqar* diartikan sebagai harta yang memiliki karakter tidak dapat dipindahkan secara fisik, seperti halnya bangunan atau gedung, sawah, kebun, dan sebagainya.

c. *Mitsli* dan *Qimi*

Mitsli merupakan sesuatu yang setara dan sama dalam satu ukuran dan volume, diantaranya sebagai sesuatu yang bisa ditakar, ditentukan beratnya, dihitung, dan ditaksir panjangnya. Sedangkan *qimi* sebagai karakter harta yang tidak memiliki kesamaan, dan memiliki nilai yang berbeda berdasarkan pada kualitas.

d. *Istihlaki* dan *Isti'mali*

Istihlaki diartikan dengan sesuatu dianggap akan memiliki nilai apabila terjadi perubahan bentuk secara fisik, seperti makanan. Sedangkan *isti'mali* sebagai karakter harta yang bernilai apabila mengalami kerusakan secara hakiki seperti rusak dan habisnya secara fisik hanya satu kali korek api apabila dibakar, dan rusak secara *haquqi* adanya kerusakan secara makna seperti rusak atau habisnya uang ketika uang tersebut digunakan untuk transaksi. Dan terdapat *isti'mali* yang rusak dan habis dengan berkali-kali seperti halnya kontrakan.³⁶

e. *Mamluk*, *Mubah*, dan *Mahjur*

Mamluk dikategorikan pada sesuatu milik individu maupun kelompok berdasarkan pada kerja sama. *Mubah* dikategorikan pada harta yang asalnya bukan kepemilikan seseorang atau kelompok seperti pohon atau tanaman di hutan. Harta ini dapat berubah kedudukan menjadi *mamluk* apabila ada kesanggupan orang yang akan merubahnya, sesuai dengan sabda Nabi, barang siapa yang menghidupkan tanah, hutan milik seseorang, maka ia yang paling berhak memilikinya. *Majhul* diklasifikasikan pada harta yang tidak dapat dimiliki oleh individu akan tetapi secara umum oleh masyarakat atau milik Negara untuk kepentingan masyarakat semisal fasilitas umum.

Walaupun terdapat perbedaan sudut pandang terhadap konsep harta oleh para ulama fiqih, akan tetapi pada dasarnya dalam prinsip ekonomi Islam adalah *masalahah*, dan pendekatan yang digunakan dalam *qaidah* ekonomi adalah *qaidah al-khamsah* dan *qaidah muamalah*. Indonesia memiliki lembaga di bawah naungan pemerintah yang husus mengkaji permasalahan-permasalahan kehidupan yang belum ada ketetapan hukumnya dan hal-hal yang terdapat perbedaan dalam sudut pandang ulama fiqih yaitu lembaga DSN MUI. Menurut Zaih Mubarak pengkajian yang dilakukan oleh MUI berdasarkan pada al-Quran, hadits, ijma, qiyas, dan ijtihad³⁷

6. Harta dalam Fiqih Muamalah

Harta sebagai serangkaian konsep kecil tapi penting dalam sistem kehidupan manusia. Islam mengatur secara teoritis bagaimana manusia memandang harta sebagai sarana mencapai tujuan hidup dan secara praktis bagaimana manusia mendapatkan sesuatu yang

³⁶ (Dimyauddin Djuawaini 2008,25)

³⁷ Adawiyah, Endah Robiatul .Udin Wahrudin, *Fatwa Dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Serang: CV. AA Rizki, 2021), hlm. 6

menjadi kebutuhannya dan bernilai dalam kehidupannya sejalan dengan nilai-nilai Islamiyah, Para ahli ushul fiqih memandang harta sebagai salah satu dari tujuan *maqashid syar'iyah*, yakni, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

a. Secara teoritis harta dalam Islam memiliki kedudukan:

Pertama, harta merupakan amanat Allah, untuk dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Hadid ayat 7 yang artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya, maka orang-orang beriman diantaramu dan menafkahkan sebagian hartanya mendapatkan pahala yang besar.” *Kedua*, harta merupakan perhiasan, untuk digunakan serta dinikmati dengan baik sesuai dengan kadarnya dan tidak berlebihan, karena manusia memiliki potensi kecintaan pada harta dan kecenderungan ingin memilikinya, yang ditegaskan melalui firman Allah dalam surat ke-3 ayat 14, dengan makna “Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu: wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.”

Ketiga, harta merupakan cobaan ketakwaan bagi umat muslim isi surat At-Taghabun ayat 15: “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan dan di sisi Allahlah pahala yang besar”. Harta akan menjadi ladang pahala apabila digunakan untuk beribadah dengan memperhatikan keseimbangan hak. Dalam harta terdapat katagori harta dengan katagori tertentu, yang diberikan pada orang tertentu dengann syarat tertentu ³⁸

b. Harta secara Praktis

Islam memiliki konsep harta dimaknai secara teoritis dan praktis. bagaimana islam mengatur manusia dalam cara memperolehnya haarus baik dan benar atau halal, ini menunjukan bahwa manusia diperbolehkan mencari harta, sebagai alat untuk mencapai tujuan keridaan Allah. Cara perolehan harta yang sesuai dengan prinsip syari'ah disebut dengan *Maghrib* yakni terhindar dari *maysir*, *gharar*, *haram*, *riba*, dan *bathil*.

Gharar adalah transaksi yang tidak jelas, dan semuanya itu mengandung ketidakpastian antara hak dan kewajiban pada setiap yang dilakukan. ³⁹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ إِنَّا كُنَّا لَفَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِأَلْسِنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 188).

³⁸ Faidati, “Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus Di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung),” hlm. 181.

³⁹ Juanda, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi,” *Al-Iqtishad* 1, no. Gharar, Keadilan, Transaksi Ekonomi. (2009): 2.

Selain itu yang harta harus terhindar dari yang haram, yang diartikan dengan segala hal yang dilarang, tidak dianjurkan, membahayakan dan tidak pernah didiamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dalam Al-Quran maupun dalam hadits. Baik itu dalam bentuk pernyataan tegas maupun dalam bentuk prinsip.⁴⁰ Dalam surat al-A'raf: 33, "Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar (mengharamkan) mempersekutukan dengan Allah sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Dalam ayat yang lain Allah secara tegas melarang *tahakkum* (penetapan hukum tanpa didasari *argument* atau dalil. Ini dapat dipahami dari ayat berikut "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung" (Q.S. an-Nahl: 116)

Penetapan hukum halal dan haram, itu sebagai hak progresif Allah. Bisa disebutkan bahwa yang menentukan halal dan haramnya harta, apapun itu bagian muamalah yang mesti sesuai dengan Al-Qur'an, sunah, serta qaidah-qaidah hukum, dalam arti semuanya harus dapat dipertanggungjawabkan secara syari'ah.

Dari usaha-usaha manusia dalam memperoleh harta dapat digolongkan pada: cara langsung, cara ini sebut harta bebas yang dilakukan pada harta yang belum menjadi milik seseorang dan kelompok yang berasal dari harta milik umum seperti tambang; dan harta yang diperoleh dengan transaksi akad atau perikatan dalam Islam. Hal ini menunjukan adanya perolehan dari pihak satu dengan pihak lainnya dengan proses akad, baik itu akad *tabarru*, *tadhayun*, dan akad *tijarri*. Menurut Juhaya akad *tabarru* memiliki kesamaan dengan akad *tadhayun*, yakni tidak berorientasi mencari keuntungan, dengan cara yang berbeda, *tabarru* dengan cara memberi sedangkan *tadhayun* dengan cara meminjamkan, dan akad *tijarri* bertujuan untuk mencari keuntungan.⁴¹

D. SIMPULAN

Implikasi dari perbedaan sudut pandang terhadap harta dikalangan ulama fiqih melahirkan perbedaan status hukum. Yang paling mendasar terdapat perbedaan konsep harta dalam hal manfaat dan hak dalam implikasi pada: *pertama*, perbedaan ulama fiqih dalam kedudukan harta, dari segi manfaat yang melahirkan perbedaan hukum pengembalian, Jumhur ulama sepakat bahwa orang yang *mengghasab* harta orang lain dan memanfaatkannya, maka

⁴⁰ Gema Rahmadani, "Halal Dan Haram Dalam Islam," *Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. volume 2/ nomor 1/ juni 2015 (2015): 4.

⁴¹ S Pradja Juhaya, *Ekonomi Syariah*, ed. Beni Ahmad Saebani, Bandung: CV Pustaka Setia, II (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 87.

wajib mengembalikan harta secara fisik dan pengembalian atas manfaat yang digunakannya, sedangkan menurut ulama Hanafiah pengembalian harta *ghasab* hanya dalam bentuk fisiknya saja tidak dalam bentuk pengembalian manfaat. *Kedua*, dalam konsep *ijarah* atau sewa, Pada akad sewa atau *ijarah* akan berakhir dengan berakhirnya masa akad, yang menjadi perbedaan dalam hal berakhir dan keberlanjutan dalam bentuk waris, menurut ulama Hanafiah, *ijarah* akan berakhir apabila *muakid* meninggal dunia dan tidak diwariskan, sedangkan Jumhur ulama menganggap bahwa meninggalnya salah satu *muakid* tidak mengakibatkan berakhirnya akad *ijarah* akan tetapi akan berlanjut menjadi hak waris. dan *ketiga*, dalam konsep warisan, perbedaan pendapat hak yang dapat diwariskan adalah tentang hak *khiyar syarat*, dan *ru'yah*, menurut ulama Hanafiah hal tersebut tidak dapat diwariskan sedangkan menurut jumhur ulama hal tersebut dapat diwariskan.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman, Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Adawiyah, Endah Robiatul .Udin Wahrudin. *Fatwa Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Serang: CV. AA Rizki, 2021. www.aarizki.com.
- Al-Utsaimin., Muhammad bin Sholih. *Fatwa-Fatwa Zakat*. Jakarta: Darussunnah, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktis*. Cet-15. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ash-Shiddieqy., Tengku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djuawaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djuawaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- . *Pengantar Fiqh Muamalah*. yogyakarta,: Pustaka pelajar, 2008.
- Faidati, Ashima. "Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus Di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2018).
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontestual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasan Ridwan, Ahmad. Safrudin, Irfan. *Dasar-Dasar Epistemologi Islam*. Ke-1. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Hendrianto, Hendrianto, and Juhaya S Praja. "Sharia Philosophy Correlation and the Islamic Economic Philosophy." *Economit Journal: Scientific Journal of Accountancy, Management and Finance* 1, no. 1 (2021): 12–20.
- Iswandi, Andi. "Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 1 (2014).
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Ke-3. Jakarta: Amzah, 2013.
- Juanda. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi." *Al-Iqtishad* 1, no. Gharar,Keadilan,Transaksi Ekonomi. (2009): 12.

- Juhaya, S Pradja. *Ekonomi Syariah*. Edited by Beni Ahmad Saebani. Bandung: CV Pustaka Setia. II. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1987.
- Lubis, Paulina, Rafiqi Rafiqi, Ary Dean Amri, and Fitri Widiastuti. "Measuring The Level of Knowledge and Awareness of The People in Jambi Province Pay Zakat Through E-Commerce." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 6, no. 2 (2021): 292.
- Moleong, D. M. A. Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 38th ed. Bandung: PT. Rosda Karya, 2018.
- Munawwaroh, Mujamma'almaalik fadh li thiba al-mushaf asy-syarif medinah. "Al-Qur'an Dan Terjemah." *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan penyelenggara penterjemah Al-qur'an, 1990.
- Muthmainnah, Muthmainnah. "Konsep Harta Dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 10, no. 1 (2016): 135–55.
- Rahmadani, Gema. "Halal Dan Haram Dalam Islam." *Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. volume 2/ nomor 1/ juni 2015 (2015): 20–26.
- Rusdan, Rusdan. "Konsep Harta (Al-Maal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *El-Hikam* 10, no. 2 (2017): 365–403.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiiqh Muamalah*. 8th ed. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Syafi'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Ke 3. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Wahbah, Az-Zuhaili. "Fiqih Islam Wa Adillatuhu." *Trj. DarulFikr*, 2011.